

Daftar Pustaka

Buku

Barata, Atep Adya dan Bambang Trihartanto, 2005, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta

BPK RI, 2017, *Pernyataan Standar Pemeriksaan 200 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan*, Jakarta.

Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Djalil, Rizal, 2014, *Akuntabilitas Keuangan Daerah*, PT Wahana Semesta Intermedia, Jakarta.

Huda, Ni'Matul, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kaho, Josef Riwu, 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, Yogyakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Latief, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta.

Sjafrizal, 2015, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmmudji, 1988, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Sony Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany, 2008, *APBD dan Permasalahannya*, Bayumedia Publishing, Malang.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta.

Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjandra, W Riawan, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia, Jakarta.

Tuanakotta, Theodorus M, 2014, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.

_____, 2013, *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Jurnal

YR, Rozmita Dewi & Jabbar Mohammad, “Pengaruh Pelaksanaan Risk Based Internal Auditing Terhadap Pencegahan Fraud”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 No (3), 2015, 831-836.

Ely Susanto, *Memahami Korupsi dari Perspektif Perilaku Organisasi: Mengapa Seseorang Terjebak dalam Perilaku Korup?*, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik UGM*, Vol. 13 No (1), 2009, 26.

Budi Setiyono, *Memahami Korupsi di Daerah Pasca Desentralisasi: Belajar dari Empat Studi Kasus*, *Jurnal Politika*, Vol. 8 No (1), 2017, 53-54.

Kausar, *Budaya Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Lampung*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 15 No (1), 2013, 26-34.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)

Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/3/2016 tentang Buku Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/9/2014 tentang Pedoman Pemberian Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/Pid.Sus/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2341 K/Pid.Sus/2016

Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks.

Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 17/Pid.SUS.TPK/2015/PN. Mk.

Website

<https://news.detik.com/berita/d-3876999/icw-korupsi-apbd-oleh-kepala-daerah-terjadi-paling-banyak-di-2017>, diakses pada tanggal 27 April 2018

<https://news.detik.com/berita/d-3893168/penyidikan-korupsi-bansos-rp-277-m-di-bengkalis-masuki-jilid-ii>, diakses pada tanggal 28 April 2018

<http://www.beritasatu.com/hukum/427870-korupsi-dana-pendidikan-mantan-wabup-ponorogo-dihukum-15-tahun.html>, diakses pada tanggal 28 April 2018.

<https://kumparan.com/@kumparannews/bpk-opini-wtp-bukan-jaminan-bebas-korupsi>, diakses pada tanggal 28 April 2018.

<http://www.rakyatsumsel.com/pemerintahan/kasus-dugaan-korupsi-dana-hibah-oki-2013-bisa-ada-tersangka-yang-lebih-besar>, diakses 20 Mei 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f730af90063f/dana-hibah-dan-bansos-banyak-disalahgunakan>, diakses 20 Mei 2018

<https://nasional.kompas.com/read/2013/02/20/02070085/hentikan.dana.bansos>, diakses 20 Mei 2018

<https://nasional.tempo.co/read/640250/modus-eks-pejabat-pontianak-korupsi-dana-bansos>, diakses 20 Mei 2018

<http://www.rmol.co/read/2012/01/31/53424/9-Ribu-Ormas-Penerima-Bansos-Segera-Diaudit->, diakses 20 Mei 2018

<https://www.watyutink.com/opini/Korupsi-Berjamaah-Akibat-dari-Budaya-Komunal>, tanggal 28 Desember 2018

Wawancara

Wawancara dengan Machmudah S.E. Ak., Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan II, Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, Direktorat PSMK, Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 27 Oktober 2018, di Jakarta.

Wawancara dengan wawancara dengan Ismah Alfah, Kepala Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan II, Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, Direktorat PSMK, Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 26 Oktober 2018, di Jakarta.